

strategi dan model implementasi akuntabilitas dari konsep good governance

Santi Paramitta, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20461071&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Good governance merupakan suatu konsep ideal untuk diimplementasikan karena dapat memberikan banyak manfaat. Dengan diterapkannya good governance kehidupan masyarakat dan kemajuan ekonomi dapat diwujudkan. Adanya good governance juga dapat merribantu terciptanya keseimbangan kekuatan antara negara, masyarakat dan dunia usaha. Good governance juga dapat menjamin adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu negara, masyarakat dan dunia usaha.

Kemajuan ekonomi dapat tercipta bila terdapat kepastian usaha, kerangka hukum yang jelas dan tidak adanya atau tingkat KKN yang rendah dalam kehidupan masyarakat. Disinilah perlunya good governance, yang menjadi landasan pokok tercapainya tujuan negara, timbulnya kepercayaan masyarakat dan kondisi perekonomian yang sehat.

Untuk dapat mengimplementasikan good governance terdapat beberapa hambatan dan persyaratan. Untuk mengatasinya perlu suatu perencanaan strategis yang menyangkut visi dan misi organisasi yaitu mewujudkan good governance dalam kehidupan bernegara. Perencanaan ini membutuhkan proses pengorganisasian, yang lebih lanjut akan membutuhkan suatu change management. Change management ini diperlukan untuk mempermudah proses internalisasi dan implementasi good governance.

Salah satu cara untuk melihat implementasi good governance adalah dengan mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah kepada stakeholder tentang segala sikap dan perbuatan pemerintah, baik yang menyangkut perumusan kebijakan, pemberantasan KKN ataupun penggunaan sumber daya yang sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Ini semua membutuhkan suatu indikator yang kongkrit, yang telah disusun dalam perencanaan strategis pemerintah.

Studi ini merupakan studi kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan berusaha memperlihatkan pentingnya strategic planning guna mencapai akuntabilitas. Strategic planning pada sektor publik merupakan deskripsi tentang strategi dan model implementasi akuntabilitas dari good governance pada sektor publik. Studi ini berusaha untuk menganalisa bagaimana membangun dan menerapkan konsep akuntabilitas dengan melakukan perencanaan strategis.

Untuk inelakukan penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran, tipe penelitian yang dilakukan di sini adalah exploratory research. Dengan tipe penelitian ini dapat diketahui permasalahan yang sebenarnya,

alternatif penyelesaiannya dan variabel yang relevan. Adapun proses penelitian yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan dengan in-depth interview. Hasil interview ini dianalisa dengan menggunakan berbagai teori yang terdapat dalam data sekunder dan literatur.

Berdasarkan hasil interview yang ada, terlihat bahwa perencanaan strategis yang dipergunakan untuk organisasi sektor publik bersifat khas mengingat sektor publik memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan sektor swasta. Karakteristik unik tersebut mengacu pada stakeholders sektor publik yang lebih beragam dibandingkan sektor swasta dan memegang peranan penting dalam penyusunan rencana strategisnya. Selain itu sektor public memiliki tujuan yang sangat abstrak sehingga sulit untuk dikuantifisir, meskipun dalam skala kecil, BPKP telah berusaha untuk mengkuantifisirnya dengan mengembangkan suatu sistim untuk mengimplementasikan konsep akuntabilitas dari pelaksanaan strategic planning dari organisasinya. Selain sifat khas tersebut, ternyata sektor publik juga perlu mempertimbangkan desired goals, external support dan kapasitas organisasi. BPKP telah berusaha untuk mendefinisikan desired goals, visi dan misi secara jelas, terarah dan konkrit dalam perencanaan strategis mereka. Hal ini selanjutnya patut menjadi pertimbangan bagi pemerintah apakah akan mengambil model yang dipergunakan oleh BPKP dalam perencanaan strategisnya.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pola yang dipergunakan oleh BPKP mengingat temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki kesulitan untuk mendeskripsikan tujuan organisasinya secara lebih konkrit dan dapat diukur. Selain itu pemerintah perlu pula memperhatikan kapasitas organisasi dan kemampuan sumber daya manusianya sehingga dapat melakukan strategic planning dengan baik.